

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arikunto, S. (2009). *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- _____. (2011). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Efferin, S. (2008). *Metode Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fraser, L. M., dan Ormiston, A., (2008). *Memahami Laporan Keuangan Edisi Tujuh*. Jakarta: PT Indeks.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit - Undip.
- Gujarati, D. (1991). *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, A. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- _____. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasan, M. I., (2008). *Pokok-pokok Materi Statistik 2*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., Warfield, T. D., (2011). *Intermediate Accounting Volume 1*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Lubis, A. I. (2011). *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: Salemba Empat.

Erti Efrianti Juhariah, 2014

Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Majalengka

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- _____. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- _____. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Murniati, M. P., dkk., (2013). *Alat-alat Pengujian Hipotesis*. Semarang: Penerbitan Unika SOEGIJAPRANATA.
- Nugraha. (2009). *Modul Bahan Ajar Akuntansi Sektor Publik*. Bandung: Prodi Pendidikan Akuntansi UPI
- Riduwan. (2003). *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2012). *Pengantar Statistika Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Riduwan dan Sunarto. (2010). *Pengantar Statistika Untuk Penelitian: Pendidikan, Sosial, Komunikasi, Ekonomi, dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sarwono, J., dan Suhayati, E., (2010). *Riset Akuntansi Menggunakan SPSS*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Somantri, A., dan Muhidin, S.A., (2011). *Aplikasi Statistik dalam Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2002). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- _____. (2012). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supranto, J. (2009). *The power of Statistic : untuk Pemecahan Masalah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tanjung, A. H. (2008). *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Erti Efrianti Juhariah, 2014

Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Majalengka

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

_____. (2009). *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah untuk SKPD*. Jakarta: Salemba Empat.

Umar, H. (2002). *Metode Riset Bisnis: Panduan Mahasiswa untuk Melaksanakan Riset Dilengkapi Contoh Poposal dan Hasil Riset Bidang Manajemen dan Akuntansi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

_____. (2008). *Desain Penelitian Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

_____. (2008). *Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan: Paradigma positivistik dan berbasis pemecahan masalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Wijaya, HAW. (2002). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Yani, A. (2002). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Yusuf, M. (2013). *Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Salemba Empat.

Jurnal :

Azlim, Darwanis, dan Bakar, U. A. (2012). “Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh”. *Jurnal Akuntansi*. 1, (1), 1-14.

Flamholtz, E. G., Bullen, M. L., dan Hua, W. (2002). “Human Resource Accounting: A Historical Perspective and Future Implications”. *Management Decision Journal*. 40/10, 947-954.

Handayani, S. (2010). “Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2006”. *Jurnal Ilmu Administrasi*. VII, (2), 1-12.

Erti Efrianti Juhariah, 2014

Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Majalengka

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- Hidayati, A. (2002). “Perkembangan Riset Akuntansi Keperilakuan: Berbagai Teori dan Pendekatan yang Melandasi”, *JAAI*. 6, (2), 1-16.
- Ishak, M. (2007). “Fenomenologis Sumber Daya Manusia Dalam Konteks Pengelolaan Aset Daerah”. *Inovasi*. 4, (1), 1-6.
- Kusuma, I. W. (2003). “Topik Penelitian Akuntansi Keperilakuan dalam Jurnal Behavioral Research In Accounting (BRIA)”. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. 5, (2), 147-166.
- Nugraheni, P., dan Subaweh, I. (2008). “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”. *Jurnal Ekonomi Bisnis*. 13, (1), 1-11.
- Ratih, A. E. (2012). “Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kinerja SKPD pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau”. *Universitas Sumatera Utara*
- Schultz, T. W. (1961). “Investment In Human Capital”. *The American Economic Review*. 51, (1), 1-17.
- Solikin, A. (2006). “Penggabungan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah: Perkembangan dan Permasalahan”. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. 2, (2), 1-15.
- Sukmaningrum, T. (2012). “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang)”. *Universitas Diponegoro*
- Tuasikal, A. (2008). “Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota Maluku)”. *Finance and Banking Journal*. 10, (1), 1-23.
- Yuliani, S., Nadirsyah, Bakar, U., (2010). “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh)”. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*. 3, (2), 206-220.

Erti Efrianti Juhariah, 2014

Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Majalengka

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Yuliarta. (2013). “Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Padang)”. *Universitas Negeri Padang*

Peraturan perundang-undangan dan Dokumen :

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2011). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2011*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

_____. (2012). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2011*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

_____. (2012). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2012*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Departemen Dalam Negeri. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.

_____. (2007). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.

_____. (2007). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.

_____. (2011). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.

Erti Efrianti Juhariah, 2014

Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Majalengka

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). *Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli 2009*. Jakarta: Salemba Empat.

_____.(2011). *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 16* . Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2005). *Buletin Teknis Nomor 01 Tahun 2005 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat sebagai pedoman bagi instansi pemerintah pusat dalam menyusun neraca awal sesuai dengan SAP*. Jakarta: KSAP.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (1998). *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 Tentang Penyelegaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: MPR-RI.

Pemerintah Kabupaten Majalengka. (2008). *Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Majalengka*. Majalengka: Pemerintah Kabupaten Majalengka.

_____. (2009). *Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah*. Majalengka: Pemerintah Kabupaten Majalengka.

_____. (2009). *Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka*. Majalengka: Pemerintah Kabupaten Majalengka.

_____. (2011). *Peraturan Bupati Majalengka Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Majalengka*. Majalengka: Pemerintah Kabupaten Majalengka.

_____. (2012). *Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, Pelaporan dan Penertiban Barang Milik Daerah Kabupaten Majalengka*. Majalengka: Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Erti Efrianti Juhariah, 2014

Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Majalengka

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- _____. (2012). *Peraturan Bupati Majalengka Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Majalengka*. Majalengka: Pemerintah Kabupaten Majalengka.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Republik Indonesia.
- _____. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Republik Indonesia.
- _____. (2000). *Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*. Jakarta: Republik Indonesia.
- _____. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Republik Indonesia.
- _____. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*. Jakarta: Republik Indonesia.
- _____. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Jakarta: Republik Indonesia.
- _____. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Republik Indonesia.
- _____. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Republik Indonesia.
- _____. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Republik Indonesia.
- _____. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Republik Indonesia.
- _____. (2006). *Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Jakarta: Republik Indonesia.

Erti Efrianti Juhariah, 2014

Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Majalengka

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- _____. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*. Jakarta: Republik Indonesia.
- _____. (2008). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Republik Indonesia.
- _____. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Republik Indonesia.

Skripsi/Tesis/Disertasi :

- Ningsih, W.Y. (2012). *Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya terhadap Kewajaran Informasi Keuangan (Survey Pada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Wilayah IV Provinsi Jawa Barat)*. Skripsi. Bandung: Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia.
- Rosmawati, R. (2011). *Pengaruh Kompetensi SDM Keuangan dan Peran Auditor Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung*. Skripsi. Bandung: Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sihombing, B. (2011). *Pengaruh Penerapan SAP dan SAKD terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Penelitian Pada Pemerintah Kabupaten Kota Wilayah Priangan Jawa Barat)*. Skripsi. Bandung: Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia.

Internet :

Erti Efrianti Juhariah, 2014
Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Majalengka
 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Abdurrahman, I. (2012). LHP BPK untuk Majalengka WDP. [Online]. Tersedia: <http://www.majalengka.suarajabar.com/pemerintahan/pemkab/366-lhp-bpk-untuk-majalengka-wdp.html>. [14 januari 2013]

Nasir. (2012). BPK Banyak Temukan Permasalahan dalam LKPD Majalengka 2011. [Online]. Tersedia: <http://www.kangnasir.com/bpk-banyak-temukan-permasalahan-dalam-lkpd-majalengka-2011/>. [6 februari 2013]



Erty Efrianti Juhariah, 2014

Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Majalengka

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu